

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF
IMAM MAZHAB EMPAT
(STUDI KASUS LASKAR ISLAM DI SURAKARTA)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata II
pada Jurusan Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana**

Oleh:

MUHAMMAD FACHRUDDIN

NIM: O 200180016

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF
IMAM MAZHAB EMPAT
(STUDI KASUS LASKAR ISLAM DI SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

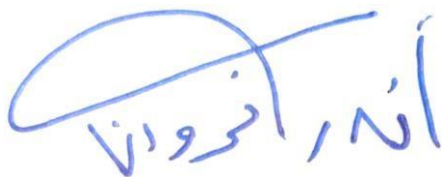
Oleh

MUHAMMAD FACHRUDDIN

NIM: O 200180016

Telah diuji dan diperiksa oleh:

Pembimbing I,



Andri Nirwana. AN, Ph.D

Pembimbing II,



Dr. Imron Rosyadi, M. Ag

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF
IMAM MAZHAB EMPAT
(STUDI KASUS LASKAR ISLAM DI SURAKARTA)**

Oleh:

Muhammad Fachruddin

NIM: 0200180016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu Tanggal 8 Januari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Imron Rosyadi, M. Ag
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Andri Nirwana. AN, Ph.D
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)



Direktur:


Prof. Dr. Bambang Sumarjoko, M. pd

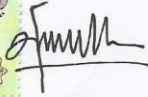
PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ke Pascasarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas maka dipertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Januari 2021

METERAI
TEMPEL
14AHF435252314
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Muhammad Fachruddin

**Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet dalam Perspektif Imam Mazhab Empat
(Studi Kasus Laskar Islam di Surakarta)**

ABSTRAK

Jual beli motor kredit macet adalah transaksi jual beli motor yang tidak dilengkapi surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau biasa diistilahkan dengan motor “STNK Only”, “Motor Pedotan” atau “Motor Bodong”. Praktik jual beli ini dilakukan oleh sebagian oknum dari laskar umat Islam di Surakarta dengan dalih memerangi sistem riba dan menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, yaitu membela masyarakat (debitur) yang terzalimi oleh perilaku *debt collector* yang sering bertindak di luar prosedur hukum. Sebagai bentuk respon perlawanan terhadap tindakan tersebut, beberapa oknum dari kalangan laskar membentuk gerakan anti riba yang bertujuan untuk menghancurkan *sistem ribawi* (sistem yang menerapkan adanya bunga atas pinjaman dan adanya denda bila terlambat pembayaran). Dalam konteks ini yang disasar adalah perusahaan *finance* atau *leasing* konvensional. Caranya, unit motor kredit yang dibeli melalui *leasing* sengaja dimacetkan angsuran kreditnya dan dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak *leasing* (kreditur). Tujuan dari penelitian ini menjelaskan praktik jual beli motor kredit macet di kota Surakarta dalam perspektif Imam Empat Mazhab. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu mereduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta dalam perspektif mazhab empat telah menyalahi beberapa ketentuan hukum Islam. *Pertama*; proses jual beli motor kredit macet sebenarnya adalah proses jual beli terhadap barang milik orang lain. Para ulama mengistilahkan dengan *bai'u fudhuli*, yaitu jual beli yang dilakukan terhadap barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang. Jual beli seperti ini menurut Imam Mazhab Hanafi dan Maliki masih bisa dipandang sah bila setelah akad tersebut ada persetujuan pemilik barang. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i dan Hanbali, ditegaskan bahwa akad jual beli tersebut adalah haram karena tidak memiliki izin atau hak wewenang dari pemilik barang. Selain itu, praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta juga memiliki unsur yang dapat mencederai akad transaksi, yaitu adanya I'tikat tidak baik dari debitur untuk melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). dan hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh ulama mazhab empat.

Kata kunci: Kredit macet, Leasing, laskar dan Mazhab.

ABSTRACT

The sale and purchase of bad credit motorbikes is the sale and purchase transaction of a motorbike that is not equipped with a Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) or is commonly termed a motorbike "STNK Only", "Motor Pedotan" or "Motor Bodong". The practice of buying and selling is carried out by some elements of the Muslim army in Surakarta under the pretext of fighting the usury system and enforcing *amar ma'ruf nahi mungkar*, namely defending the community (debtors) who are wronged by the behavior of debt collectors who often act outside legal procedures. As a form of resistance to this action, some elements from the *laskar* formed an anti-usury movement which aimed to destroy the Ribawi system (a system that applies interest on loans and fines for late payments). In this context, the target is finance or leasing companies. To do this, motor credit units purchased through leasing are deliberately jammed in credit installments and sold to other parties without the knowledge of the leasing party (creditor). The purpose of this research is to explain the practice of buying and selling bad credit motorbikes in the city of Surakarta in the perspective of the Perspective of Imam School of Four. This research is descriptive qualitative with a sociological approach, data collection methods are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show that the practice of buying and selling bad credit motorbikes in Surakarta in the perspective of school four has violated several Islamic law provisions. *First*; the process of buying and selling bad credit motorbikes is actually the process of buying and selling other people's belongings. The scholars term it *bai'u fudhuli*, which is buying goods that are made to other people's property without the knowledge or permission of the owner of the goods. Trading like this according to Imam Hanafi and Maliki Schools can still be considered valid if after the contract there is approval from the owner of the goods. Meanwhile, in the Syafi'i and Hanbali Schools, it is emphasized that the sale and purchase agreement is haram because it does not have permission or authority rights from the owner of the goods. In addition, the practice of buying and selling bad credit motorbikes in Surakarta also has elements that can injure the *tranksaki* contract, namely the existence of a bad certificate from the debtor to break promises (defaults). and this is clearly contrary to Islamic law which has been agreed upon by all scholars of the four schools

Keywords: bad credit, leasing, *laskar* and *mazhab*

1. PENDAHULUAN

Dalam terminology hukum Islam, Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima pertukarannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara'. Maksud dari ketentuan yang dibenarkan syara' adalah memenuhi segala bentuk rukun, persyaratan, dan hal-hal lain yang terkait dengan jual beli. Bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'* (Hendi Suhendi, 2002: 69). Ketentuan ini berdasarkan firman Allah ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....” (Q.S. An-Nisa' (4): 29)

Pesan normatif yang terkandung dalam ayat di atas menunjukkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Rifa'ah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW. pernah ditanya, ‘Pekerjaan apakah yang paling baik?’ Beliau bersabda, ‘Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih’.”(HR. Ahmad, no. 17265)

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. Diantara bentuk kedustaan dalam jual beli adalah menyembunyikan aib

barang dari penglihatan pembeli. Sementara jual beli akan dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya objek barang yang diperjualbelikan harus memiliki kejelasan kepemilikan dan diketahui wujudnya, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara dua belah pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

Seiring berlalunya zaman, kajian tentang jual beli pun terus berkembang, praktek serta model transaksinya semakin bervariasi yang mungkin belum pernah ada pada zaman ketika Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* masih hidup. Salah satu di antaranya adalah praktek jual beli dalam bentuk kredit, yaitu jual beli barang dengan pembayaran tidak tunai atau ditangguhkan. Sistem jual beli kredit merupakan bentuk transaksi baru yang cukup banyak diminati masyarakat. Bahkan sistem transaksi ini lebih banyak digunakan daripada jual beli dengan cara bayar tunai. Terutama dalam transaksi jual beli kendaraan. Walaupun terbilang harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga beli secara cash, transaksi dengan sistem kredit tetap dipandang lebih mudah dan tidak memberatkan konsumen untuk bisa mendapatkan kendaraan.

Kondisi tersebut menjadi ajang perlombaan perusahaan *multifinance* (leasing) untuk menawarkan jasa kredit kendaraan kepada masyarakat. Dengan strategi yang beragam, perusahaan-perusahaan tersebut terus bersaing menjajakan kemudahan fasilitas kepada calon nasabah untuk mendapatkan kendaraan kredit. Sehingga muncul berbagai macam bentuk iklan yang menawarkan jasa kredit di setiap sudut kota. Bahkan selain diiming-imingi bonus dan potongan harga cicilan, ada juga yang menawarkan kredit kendaraan hanya dengan uang muka lima ratus ribu rupiah saja. Tanpa ada satu pun syarat yang memberatkan, pembeli sudah bisa membawa pulang kendaraan baru.

Efeknya, banyak nasabah atau debitur yang kemudian terjatuh dengan tunggakan kredit dan tidak mampu melunasi angsurannya kepada pihak leasing. Motor yang sudah digunakan oleh debitur pun disita kembali atau bahkan diambil paksa oleh leasing. Menghadapi hal tersebut, banyak di antara debitur yang

melakukan perlawanan dan tidak mau menyerahkan unit motor yang telah dibelinya secara kredit. Akibatnya, pihak leasing pun membayar jasa penagih hutang (*debt collector*) untuk memaksa debitur agar mau menyerahkan unit motornya atau kalau tidak akan diambil secara paksa. Sehingga banyak di antara debitur yang merasa terdzalimi karena mendapatkan perlakuan kasar oleh *debt collector*. Merespon hal tersebut, ada semacam gerakan baru yang dilakukan oleh sebagian anggota laskar umat Islam di Kota Surakarta, yaitu memanfaatkan kemudahan pembelian motor kredit yang disediakan oleh perusahaan leasing dengan tujuan dimacetkan angsuran kreditnya agar leasing tersebut bangkrut.

Modusnya lazim sebagaimana prosedur jual beli motor kredit yang ada, mereka mengajukan kredit motor melalui perusahaan leasing tertentu. Transaksi dilakukan secara normal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Semua persyaratan dipenuhi. Akan tetapi mereka sengaja melakukan ‘itikat yang tidak baik, motor yang dibeli secara kredit tersebut dimacetkan angsurannya secara sepihak (*wanprestasi*). Angsuran kredit hanya dibayar dua sampai tiga kali saja, setelah itu barang dijual dengan harga murah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur.

Selain itu, ada juga kendaraan yang diperoleh laskar dengan cara dibeli dari pihak debitur yang bermasalah dalam melunasi angsuran kredit atau yang disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). Modusnya, kendaraan yang bermasalah tersebut dibeli oleh laskar kemudian dijual kembali dengan harga murah tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Agar dalam pemakaiannya tidak terjadi masalah administrasi, pihak laskar pun siap menjamin keamanan terhadap kendaraan tersebut dengan cara menjalin kerja sama (*kongkalikong*) dengan beberapa pihak yang terlibat di dalamnya.

Umumnya, model jual beli kendaraan kredit macet ini dilakukan oleh beberapa pihak dengan diiringi perasaan bersalah karena melawan norma hukum yang berlaku, sehingga transaksinya pun cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi kondisi tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi di

Kota Surakarta. Transaksi jual beli motor kredit macet justru dilakukan dengan sengaja tanpa diiringi perasaan bersalah. Tidak ada ketakutan karena melawan hukum. Praktik transaksi pun dilakukan secara transparan. Tidak ada hal yang disembunyikan. Iklannya banyak disebar di media sosial seperti Facebook, Whatsapp dan sebagainya. Bahkan di beberapa lokasi, layaknya *showroom* motor, mereka dengan bebasnya memajangkan motor-motor tersebut guna diperjualbelikan.

Alasannya sangat idiologis, yakni melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam hal ini membantu orang-orang yang terdzalimi oleh perilaku *debt collector* yang sering menekan dan mengambil paksa motor dari debitur yang tertunggak angsuran kreditnya. Berikutnya, sebagian oknum dari laskar umat Islam, ada yang menyediakan jasa untuk menjual motor tersebut kepada pihak lain dengan jaminan keamanan bebas dari incaran *debt collector*. Sebab, bila unit motor sudah disita oleh *debt collector*, debitur tidak lagi mendapatkan apapun dari penjualan motor tersebut walaupun dia sudah membayar sekian persen dari angsuran kredit yang disepakati antara dia dengan kreditur (leasing).

Kemudian praktik transaksi jual beli motor kredit macet tersebut pun dikuatkan argumentasinya dengan dalil meruntuhkan sistem ribawi yang dinilai banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah. Dalam pandangan pelaku, model transaksi kredit yang dimacetkan angsurannya dinilai efektif untuk menghancurkan lembaga keuangan ribawi. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud adalah lembaga pembiayaan leasing. Sebab, dalam pandangan mereka, keberadaan lembaga pembiayaan leasing bukan melahirkan solusi buat masyarakat miskin yang membutuhkan kendaraan, tapi justru mencekik perekonomian rakyat miskin. Sehingga perlu ada upaya untuk meruntuhkan eksistensi lembaga-lembaga tersebut.

Logika sederhananya, semakin banyak motor kredit yang dimacetkan maka nilai kerugian yang harus ditanggung pihak leasing pun juga semakin besar. Jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka lembaga keuangan leasing pasti akan mengalami kekeringan likuiditas. Keringnya likuiditas ini mengakibatkan sistem

lembaga keuangan akan terhambat. Produk-produk dan layanan jasa yang ditawarkannya menjadi tidak berarti dan tidak laku serta minim digunakan oleh masyarakat. Sehingga pada tahap tertentu, lembaga tersebut akan *kollaps* dan tidak bisa berfungsi kembali

Dari pemaparan kasus yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik jual beli motor kredit macet dalam perspektif Imam Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam di Surakarta).

2. METODE

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah peneliti berangkat ke lokasi kejadian untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau insiden. Penelitian ini dipusatkan pada fenomena praktik jual beli motor kredit macet yang terjadi di Surakarta Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis yaitu menggambarkan kondisi masyarakat secara lengkap dengan struktur, lapisan, dan berbagai gejala sosial dapat dilihat dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan dan mobilitas sosial dan keyakinan-keyakinan masyarakat. Agama dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan itu dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis. (Sudarno dkk. 2016: 12). Teori lain yang mendukung kajian ini adalah Teori Fenomenologi, yaitu pendekatan secara mendalam terhadap suatu fenomena yang menyita perhatian masyarakat luas karena keunikan dan kedahsyatan fenomena tersebut. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini akan berupaya untuk menemukan fakta secara utuh seputar fenomena transaksi jual beli motor kredit macet yang terjadi di kota Surakarta.

Obyek penelitian ini adalah praktik jual beli motor kredit macet yang terjadi di Kota Surakarta Jawa Tengah. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah masyarakat Surakarta yang terlibat atau yang dianggap tahu tentang tentang proses

transaksi jual beli motor kredit macet seperti tokoh ormas, anggota laskar, lembaga leasing, *debt collector* dan tokoh agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jual beli motor kredit macet telah lazim dilakukan oleh sebagian laskar umat Islam di Surakarta. Motor kredit macet yang dimaksud adalah motor yang masih dalam masa kredit dan belum lunas angsurannya. Motor tersebut dengan sengaja diputuskan angsuran kreditnya oleh debitur lalu dijual atau digadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Dalam bahasa lain, status motor seperti ini biasa juga diistilahkan dengan motor “STNK Only” (hanya disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan), biasa disingkat juga dengan kode “Motor ST”. Dalam bahasa lain juga disebut “Motor Separo” dan dalam istilah bahasa jawa dikenal dengan istilah “Motor Bodong” atau “Motor Pedotan”.

Motor kredit macet atau motor pedotan biasanya didapatkan dari debitur yang tidak sanggup lagi melunasi cicilan kreditnya kepada pihak leasing, atau diproses langsung dengan cara melakukan kredit ke lembaga leasing kemudian diputuskan angsuran/cicilannya (wanprestasi) secara sepihak. Motor kredit macet tersebut lalu dijual secara bebas ke calon pembeli dengan harga murah. Iklannya banyak disebarkan di jejaring media sosial seperti Facebook, Whatsapp dan sebagainya. Proses transaksi pun dilakukan secara transparan tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, baik soal kondisi fisik motor maupun status surat yang menyertainya. Selain itu, proses jual belinya juga terbilang cukup sederhana dan tidak disertai dengan kwitansi pembelian seperti umumnya orang yang membeli motor.

Maraknya jual beli motor kredit macet di kalangan laskar berawal dari respon mereka terhadap perintah *amar ma'ruf nahi mungkar*, yaitu membela masyarakat yang resah terhadap tindakan kasar para *debt collector* yang menyita motor kredit macet tanpa prosedur hukum yang jelas. Bahkan tidak sedikit di antara korban yang diteror, dianiaya, sampai pada taraf dikeroyok dan diambil paksa motornya. Kasus kekerasan

tersebut berulang kali terjadi dan sering meresahkan warga. Akhirnya, beberapa kalangan dari kelompok muslim berinisiatif membentuk laskar yang fokus pada penegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* guna menghadang aksi premanisme *debt collector*. Berikutnya, gerakan ini pun berubah menjadi semacam rutinitas baru dalam mencari keuntungan dengan cara melakukan praktik jual beli motor kredit macet tanpa sepengetahuan pihak leasing (kreditur).

Ada beragam alasan yang dikemukakan para pelaku mengapa praktik jual beli ini bisa eksis di kalangan laskar. Selain semangat penegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* untuk menghadang aksi premanisme *debt collector*, para pelaku juga sering mengatasnamakan gerakannya dengan laskar anti riba yang berfokus pada upaya menghancurkan lembaga ribawi. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud adalah lembaga pembiayaan leasing. Sebab, dalam pandangan para pelaku, keberadaan lembaga pembiayaan leasing bukan melahirkan solusi buat masyarakat miskin yang membutuhkan barang, tapi justru mencekik perekonomian rakyat miskin.

Logika sederhananya, semakin banyak motor kredit yang dimacetkan maka nilai kerugian yang harus ditanggung pihak leasing pun juga semakin besar. Jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka lembaga keuangan leasing pasti akan mengalami kekeringan likuiditas. Keringnya likuiditas ini mengakibatkan sistem lembaga keuangan akan terhambat. Produk-produk dan layanan jasa yang ditawarkannya menjadi tidak berarti dan tidak laku serta minim digunakan oleh masyarakat (Nurul Fitria. 2012: 13). Sehingga pada tahap tertentu, lembaga tersebut akan rugi, kollaps dan tidak bisa berfungsi kembali.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli biasa dilaksanakan dengan cara cukup sederhana. Hanya lewat lisan saja tanpa ada bukti hitam di atas putih. Motor biasanya dijual melalui jalur makelar hanya disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja, tanpa dilengkapi surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Sehingga harga jualnya pun tergolong sangat murah bila dibandingkan dengan harga motor pada umumnya. Rata-rata harga yang ditentukan lebih murah hingga 50% dari harga motor

yang dijual secara normal. Contohnya, motor matic Honda Beat POP keluaran tahun 2019, oleh penjual ditawarkan hanya sekitar 5.000.000,' hingga 6.000.000,' per-unit. Padahal harga terendahnya saja yang dirilis oleh PT Astra Honda Motor (AHM) Tahun 2019 masih di atas angka 15.000.000,' per-unit.

Dalam transaksi jual beli motor kredit macet di Surakarta, ada beberapa pihak yang terlibat langsung hingga motor tersebut sampai ke tangan pembeli. Di antara pihak yang terlibat adalah:

3.1 Penjual (debitur)

Penjual adalah mata rantai pertama dalam transaksi jual beli motor kredit macet. Dalam kasus yang terjadi di Surakarta, ada dua modus yang berbeda yang dilakukan oleh para penjual motor kredit macet. *Pertama*, status penjual (debitur) karena terdesak dengan keadaan. Awalnya, ia tidak pernah memiliki niat untuk menjual motor kredit yang ada tunggakan angsuran/cicilannya kepada leasing. Namun seiring berjalannya waktu kondisi ekonominya menurun, pendapatan hariannya tidak bisa lagi melanjutkan pembayaran angsuran kredit kepada leasing. Sebelum unit motor tersebut disita secara paksa, debitur menjual unit motor tersebut kepada laskar tanpa sepengetahuan pihak leasing. Lalu untuk menyelamatkan debitur dari incaran *debt collector*, pihak laskar mengkonfirmasi unit motor tersebut kepada perusahaan leasing yang terkait bawah motor tersebut sudah di bawah kepemilikan mereka.

Tipe penjual yang kedua adalah debitur yang sejak awal sudah sengaja ingin melakukan wanprestasi terhadap akad kredit dengan pihak leasing. Penjual tipe ini sebenarnya teman dekat laskar atau sudah menjalin kerja sama dengan laskar. Modusnya, penjual mengajukan kredit motor ke leasing. Semua persyaratan dari pihak leasing dipenuhi, mulai dari KTP, KK, Struk Pembayaran Listrik terakhir, hingga uang *Down Payment* (DP) diserahkan. Setelah proses itu berlangsung, penjual mulai menyusun strategi untuk melakukan wanprestasi. Ia memang sengaja ingin memutuskan angsuran kreditnya. Caranya, jenis kredit dipilih masa tenornya paling

lama. Tujuannya, agar bayar DP-nya bisa lebih kecil. Biasanya, paling lama masa cicilannya sampai 36 kali selama tiga tahun.

Setelah proses pengajuan selesai dan motor berhasil dibawa pulang, penjual (debitur) mulai menyusun strategi berikutnya. Dengan bekerja sama laskar, motor tersebut dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan leasing. Tipe motor kredit pedotan seperti ini tergolong istimewa karena barangnya masih baru atau dalam istilah mereka, biasa juga dikenal dengan sebutan barang “nol kilometer”. Umumnya, mereka yang diajak kerjasama adalah orang-orang yang masih sepemikiran dalam memandang hukum riba atau yang sudah dikenal baik oleh laskar. Selanjutnya, bila barangnya berhasil dijual kepada pihak lain maka debitur (penjual) akan dikasih *fee* berdasarkan kesepakatan yang telah terjalin sebelumnya.

3.2 Makelar (laskar)

Makelar atau perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai makelar adalah pihak laskar. Anggota laskar yang aktif dalam praktik jual beli motor kredit macet biasanya aktif juga mengikuti forum-forum pengajian agama di komunitasnya masing-masing. Peran laskar sebagai penjamin keamanan unit motor sangat diperlukan dalam proses jalannya transaksi. Unit motor yang bermasalah angsuran kreditnya dengan leasing ditampung sama laskar. Kemudian sebelum motor tersebut dijual kembali, mereka akan mendatangi kantor leasing terkait untuk mengkonfirmasi bahwa unit motor tersebut sudah berada di bawah kepemilikan laskar.

Praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta dijalankan oleh makelar secara bebas dan terbuka, tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Iklannya banyak disebarkan lewat media sosial. Bahkan di salah satu tempat, motor-motor bekas kredit bermasalah tersebut dipajang bebas di pinggir jalan. Mirip seperti *showroom* pada umumnya, motor-motor bermasalah tersebut disusun dengan rapi. Sehingga calon pembeli bisa datang dan bebas menanyakan apa saja seputar motor tersebut.

3.3 Pembeli

Banyak yang menginginkan motor bagus tapi terhalang karena kurangnya biaya. Munculnya iklan (penawaran) motor murah tanpa BPKB cukup menggiurkan sebagian masyarakat. Apalagi motor yang ditawarkan bagus, murah plus disertai dengan jaminan keamanan dari makelar (laskar). Selama tidak keluar dari wilayah Solo Raya, unit motor tersebut dijamin tidak akan disita oleh *debt collector*. Para pembeli motor kredit macet, datang dari beragam kalangan. Data penelitian menunjukkan bahwa ada beragam alasan yang diungkapkan para pembeli motor kredit macet, diantaranya: *pertama*: motor hanya untuk digunakan di kampung, *kedua*: motor hanya dipakai untuk mengangkut barang-barang berat dan *ketiga*: paling berpengaruh pada pikiran pembeli adalah motor pedotan (kredit macet) bukan motor ilegal dan transaksinya sah menurut hukum islam karena rukun-rukun jual beli telah ada semuanya.

Terjadinya praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, ada iktikad tidak baik dari debitur yang sengaja menjual motor yang belum selesai membayar angsuran kreditnya. Dalam perjanjian yang dilakukan antara debitur dengan perusahaan *leasing*, sebenarnya debitur yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran dapat mengajukan permohonan keringanan angsuran selama angsuran tersebut tidak melampaui batas. Jika keringanan angsuran tidak dapat terbayarkan, maka perusahaan *leasing* boleh mengambil motor tersebut dan melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi agunan (jaminan) melalui badan lelang. Eksekusi dapat melalui pihak Kantor Lelang Negara atau pengadilan Negeri/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar angsuran yang terlambat sampai selesai angsuran. Apabila masih ada sisa dari hasil lelang, maka perusahaan *leasing* harus mengembalikan kepada debitur.

Dari hasil analisis peneliti, debitur dalam hal ini adalah penjual telah melakukan pelanggaran penggelapan motor karena pembebanan jaminan fidusia terhadap kebendaan berdasarkan akta jaminan fidusia masih berlangsung. Konsumen/pemilik jaminan tidak berhak mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kendaraan tanpa persetujuan tertulis antara debitur dan perusahaan *leasing*. Pelanggaran tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kepemilikan adalah hak bagi siapapun untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan berbuat bebas terhadap barang yang dimiliki. Akan tetapi, dalam kasus motor kredit kepemilikan motor belum sempurna menjadi milik debitur karena pembayaran angsuran kredit yang belum selesai. Setelah motor itu dijual, motor kredit macet yang diperjualbelikan secara kasat mata memang sudah menjadi hak milik pembeli. Namun, secara hukum motor tersebut masih berada di bawah kepemilikan perusahaan *leasing* karena BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) masih ditahan oleh perusahaan *leasing* dan belum dibaliknamakan atas nama debitur. Dengan kata lain, mereka yang membeli motor hasil penggelapan bisa dikenai pelanggaran atas tuduhan penadahan.

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta telah menyalahi beberapa ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Dalam pandangan ulama Mazhab Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qobul* (Wazarah al-Auqaf. 1404: 10). Maknanya, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh

tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*) (Nasrun Haroen. 2007: 115).

Sedangkan jumhur ulama, yaitu Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: (1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), (2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul), (3) Ada barang yang dibeli (*ma'qud 'alaihi*), (4) Ada nilai tukar pengganti barang (*tsaman*) (Wahbah. 2005: 3309).

Semua rukun yang tersebut di atas, sebenarnya sudah terpenuhi dalam praktik transaksi jual beli motor kredit macet di Surakarta. Penjual dan pembeli hadir saat transaksi berlangsung dan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaihi*) serta nilai tukar (*tsaman*) juga jelas wujudnya saat transaksi dilangsungkan. Akan tetapi, rukun-rukun tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ada beberapa syarat jual beli dan perilaku para penjual (debitur) yang menyebabkan praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta mengalami cacat hukum, di antaranya adalah barang yang menjadi obyek transaksi belum dimiliki secara sempurna. Hal ini ditandai dengan tidak disertainya surat BPKB. Sebab, motor yang ditransaksikan sebenarnya masih di bawah kepemilikan *leasing* (finance). Dalam perjanjiannya, motor kredit yang belum selesai masa angsuran kreditnya belum bisa diserahkan surat BPKB-nya dan perusahaan *leasing* tidak dapat melakukan perpindahan nama kepemilikan kepada debitur. Sehingga praktik jual beli Motor kredit macet di Surakarta sejatinya adalah transaksi atas harta kepemilikan orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik barang.

Dalam hukum Islam, tentang kepemilikan harta diatur cukup ketat. Kepemilikan atau dalam bahasa Arab disebut *al-milk* adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya serta menjadikan pemiliknya bisa menguasainya secara penuh kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam

penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak memanfaatkan atau mengambil untung dengan menjualkannya benda tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.....” (QS. An Nisaa’ [4]: 49)

Demikian juga di dalam hadits, Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* berulang kali mewanti-wanti umatnya agar berhati-hati dalam urusan muamalah; jangan sampai di dalamnya ada unsur riba, judi, menipu dan menzalimi hak orang lain. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah secara marfu’ disebutkan:

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ

“Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, “Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?” Beliau menjawab, “Meskipun hanya sebatang kayu araak (kayu untuk siwak),” (HR. Muslim)

Karena itu, seseorang tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum; menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan atau menghadiahkan harta milik orang lain tanpa adanya izin atau wewenang dari pemiliknya. Karena melakukan transaksi tanpa izin dari pemiliknya adalah bentuk merampas hak milik orang lain. Bila transaksi itu terjadi, maka orang tersebut wajib membayar ganti rugi. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ

“Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal.”

Seluruh ulama mazhab; Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa di antara syarat sempurnanya akad jual beli adalah barang yang menjadi obyek transaksi adalah milik sendiri bukan punya orang lain. Hanya mereka berbeda pendapat dalam menempatkan ketentuan kepemilikan barang sebagai syarat berlakunya akad atau tidak. Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* milik sendiri sebagai syarat akad, artinya akad jual belinya bisa dipandang sah tapi belum sempurna. Akad tersebut baru berlaku sempurna bila pemilik barang setuju dengan transaksi tersebut (Ar-Rumi, Tt: 51). Kesimpulan hukum ini berdasarkan salah satu hadits yang diriwayatkan dari Urwah Al-Bariqi, ia berkata; Bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberinya satu dinar untuk membeli satu hewan qurban (udhiyah) atau membeli satu kambing. Lantas ia pun membeli dua kambing. Salah satu di antaranya ia jual kembali dan mendapatkan satu dinar. Kemudian ia pun mendatangi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan membawa satu kambing dan satu dinar. Kemudian Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mendoakannya dengan keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu, maka ia pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya.” (HR. Abu Dawud no. 3384)

Akan tetapi, dalam pandangan Ulama Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali menetapkan bahwa kepemilikan barang adalah syarat berlakunya akad, artinya transaksi dipandang batil (tidak sah) jika barang yang ditransaksikan bukan milik sendiri atau mendapatkan izin (hak kuasa) dari yang memiliki barang. Imam An-Nawawi, salah satu ulama mujtahid dari Mazhab Syafi'I, dalam kitab *Minhaju al-Thalibin wa Umdati al-Muftiin fi al-Fiqh*, menjelaskan bahwa salah satu syarat *ma'qud 'alaihi* (obyek transaksi) yang diperjual belikan yaitu:

الْمَلِكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ

“Milik orang yang melakukan Akad, maka jual beli fudhuli (penjual harta yang bukan miliknya) adalah batal (tidak sah),” (An-Nawawi. 2005: 95)

Kesimpulan tersebut juga disampaikan oleh Ma'iy bin Yusuf Al-Maqdishi al-Hanbali dalam kitab, *Dalil at-Thalib Linaili al-Mathalib*, Bahwa salah satu syarat jual beli adalah:

أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجاز بعد

“Harta yang diperjualbelikan adalah milik penjual atau sudah mendapatkan izin (perlimpahan hak kuasa) kepadanya ketika akad berlangsung. Maka tidak sah jual beli fudhuli (jual beli harta milik orang lain) walaupun setelah itu mendapatkan izin dari pemilik barang.” (Mar'iy. 2004: 125)

Larangan melakukan transaksi jual beli terhadap barang milik orang lain didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib bahwa Rasulullah Sallallahu 'alai wasallam:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Dari Amru bin Syu'aib dari Kakeknya berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda, *“Tidak halal menjual barang yang bukan miliknya, dan tidak mengambil untung barang yang bukan tanggungannya,” (H.R Ibnu Majjah)*

Dalam praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta ada beberapa sikap debitur yang terindikasi melakukan wanprestasi, mulai dari adanya keinginan tidak melaksanakan prestasi hingga pada tingkat ingkar janji. Semua tindakan tersebut menyalahi dan bertentangan dengan asas-asas transaksi dalam hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh ulama mazhab. Bentuk pelanggaran hukum tersebut ialah:

3.4 Memutuskan Ikatan Perjanjian Secara Sepihak

Dalam prinsip perjanjian hukum Islam, tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memutuskan ikatan perjanjian secara sepihak tidaklah dibenarkan. Syariat Islam menegaskan bahwa kejujuran merupakan prinsip dasar yang mesti dimiliki oleh setiap pihak dalam melakukan transaksi. Tidak terkecuali dalam mengikat suatu perjanjian, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas akad dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak di kemudian hari. Allah Ta'ala telah mewajibkan asas ini dalam QS. Al-Ahzab (33): 70 yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”*

Dalam prinsip perjanjian hukum Islam, tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memutuskan ikatan perjanjian secara sepihak tidaklah dibenarkan. Syariat Islam menegaskan bahwa kejujuran merupakan prinsip dasar yang mesti dimiliki oleh setiap pihak dalam melakukan transaksi. Tidak terkecuali dalam mengikat suatu perjanjian, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas akad dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak di kemudian hari. Allah Ta'ala telah mewajibkan asas ini dalam QS. Al-Ahzab (33): 70 yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”*

Selain itu, prinsip perjanjian dalam hukum Islam menetapkan bahwa perjanjian akan terus mengikat diantara pihak yang berjanji hingga ditunaikan. Dalam al-Quran maupun hadits banyak sekali terdapat perintah untuk menepati janji. Terhadap siapa pun. Tidak hanya perjanjian yang dijalin antara sesama umat muslim, bahkan terhadap non muslim pun janji itu harus ditepati dan dilarang keras mengkhianatnya. Di antara ayat al-quran yang dimaksud adalah QS. An-Nahl (16) ayat 91 yang artinya: *“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya....”* Kemudian dalam

surat Al-Isra' (17) ayat 34, Allah Ta'ala juga menegaskan, *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.”*

Kemudian terdapat pula hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: *“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,”* (HR. At-Tirmidzi no. 1352)

Hadits di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam hal ini para ulama menetapkan sebuah kaidah fiqh yang disepakati oleh semua mazhab, yaitu:

تحصيل مقصود العاقدین بقدر الإمكان واجب

“Maksud yang menjadi tujuan kedua belah pihak yang ber-akad adalah wajib direalisasikan semampu mungkin” (Alu Burnu. 1424: 229).

3.5 Debitur Meremehkan dan Tidak Mau Melunasi Hutang

Dalam praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta terdapat beberapa perilaku debitur yang menunda-nunda pembayaran hutang kepada kreditur. Sebagian debitur yang melakukan wanprestasi berawal dari keterlambatannya melunasi tunggakan kredit. Sebenarnya, dalam kasus ini debitur tidak pernah berniat memacetkan angsuran kredit yang sudah dijanjikannya kepada pihak kreditur, namun karena ada masalah dengan kondisi ekonomi keluarga, tagihan kredit yang seharusnya dibayar mulai dikesampingkan. Pelan-pelan perilaku debitur mulai menunjukkan sikap meremehkan pembayaran angsuran kredit hingga akhirnya unit motor tersebut pun dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Dalam pandangan Islam, sikap meremehkan hutang adalah bentuk kezaliman yang tidak dibenarkan. Apalagi ketika dia masih memiliki aset lain yang bisa digunakan untuk melunasi hutang

tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi *sallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ،
فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan) hutangnya (kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (HR. Bukhari)

Dalam riwayat lainnya dari Amru bin Syarib disebutkan bahwa Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* membolehkan pemberi hutang untuk memberi sanksi kepada orang yang menunda pembayaran hutang.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لِيُ الْوَاجِدُ يُجِلُّ عِرْضَهُ
وَعُقُوبَتَهُ

Dari Amru bin Syarid meriwayatkan dari bapaknya, beliau berkata, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 'Penundaan hutang oleh seorang yang mampu membayar hutang menghalalkan kehormatan (harga diri) dan pemberian hukuman padanya'.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa’i)

Makna menghalalkan kehormatannya adalah bagi siapa saja yang mempunyai piutang berhak untuk mencela atau mensifati dengan buruk kepada orang yang berhutang kepadanya. Sedangkan makna pemberian hukuman adalah memenjarakannya. kesimpulan ini sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Waki’, Abdullah bin Mubarak, Ali Ath-Thanafasi dan Sofyan Ats-Tsauri (As-Safaraini. 2007: 18). Sehingga salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam bagi orang yang berhutang adalah segera melunasi hutangnya dan tidak meremehkannya. Karena itu, Ibnu Hajar Al-Haitami, salah seorang ulama dari mazhab Syafi’iyah, menyebutkan bahwa salah satu dosa besar adalah berhutang dengan niat tidak melunasinya. Ia berkata, “Dosa

besar ke 205 dan 206: berhutang dengan niat tidak melunasi atau tidak berharap akan melunasinya dengan cara ia tidak dalam kesulitan dan ia tidak memiliki sisi yang jelas yang dapat melunasi dari (hutang) nya dan orang yang menghutangi tidak sadar dengan keadaannya.” (Al-Haytami. 1987: 151)

Larangan ini berlaku umum dan tidak hanya dibatasi pada muamalah sesama umat islam saja. Terhadap orang-orang non-muslim pun Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur dalam bermuamalah. Terlebih dalam hal hutang piutang yang menyangkut hak kemilikan seseorang. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga pernah berhutang kepada orang Yahudi. Beliau membeli tiga puluh *wasaq* gandum dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah *Radhiyallahu anhum*a, beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sungguh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan orang yahudi mengambil baju besi beliau sebagai gadai jaminannya,” (HR. Bukhari)

Kemudian Salah satu faktor penggerak jalannya praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta adalah adanya pemahaman yang ingin menghancurkan sistem ribawi. Sistem ribawi yang dimaksud adalah lembaga pembiayaan finance atau perusahaan *leasing* yang mempraktikkan transaksi ribawi dan dinilai telah mendzalimi masyarakat. Dalam hukum Islam, perilaku tersebut tidak bisa dibenarkan. Sebab, upaya menghilangkan kemungkaran tidak boleh dengan cara melakukan kemungkaran yang serupa atau bahkan kemungkaran yang lebih besar.

Dalam hal ini, semua ulama dari seluruh mazhab sepakat bahwa hal tersebut dilarang dalam Islam. Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain,” (HR. Daruqutni dan Ibnu Majah)

Hadis di atas menerangkan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan. Namun menghilangkan kemudharatan itu tidak dengan melakukan kemudharatan yang serupa apalagi dengan mudharat yang lebih besar. Seseorang tidak boleh menghilangkan mudharat dengan memudharatkan orang lain. Sebab semua orang sama dihadapan hukum Syar’i. Dengan demikian tidak boleh seseorang menjaga hartanya dengan menghilangkan harta orang lain. Demikian juga tidak boleh orang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga kelaparan. Kesimpulan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk kaidah fiqh yang disepakati bersama oleh semua ulama Mazhab, kaidah tersebut adalah:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Madharat tidak boleh dihilangkan dengan madharat lainnya,” (As-Subki. 1991: 41).

Dalam redaksi lain terdapat pula kaidah fikih yang serupa, yaitu:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

“Madharat tidak boleh dihilangkan dengan madharat semisalnya,” (Ibnu Najim. 1999: 74).

Maka dalam praktik jual beli motor kredit macet yang terjadi di Surakarta, walaupun niat atau tujuan para pelaku ingin menghancurkan kemungkaran sistem ribawi tidak bisa dibenarkan dalam pandangan imam mazhab empat. Karena dalam upaya tersebut mengandung unsur kemungkaran yang lebih besar, yaitu memutuskan akad perjanjian dan menghilangkan barang hak milik orang lain.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli motor kredit macet adalah transaksi jual beli motor yang tidak dilengkapi surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Praktik jual beli tersebut sering dilakukan oleh beberapa oknum dari kalangan laskar umat Islam di Surakarta. Motor kredit macet atau motor pedotan tersebut biasanya didapatkan dari debitur yang tidak sanggup lagi melunasi cicilan kreditnya kepada pihak leasing, atau diproses langsung dengan cara melakukan kredit ke lembaga leasing kemudian diputuskan angsuran/cicilannya (wanprestasi) secara sepihak. Motor tersebut lalu dijual secara bebas ke calon pembeli dengan harga murah tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak kreditur.
2. Maraknya jual beli semacam ini di kalangan laskar berawal dari respon mereka terhadap perintah *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu adanya keresahan masyarakat terhadap tindakan kasar para *debt collector* yang menyita motor/mobil kredit yang bermasalah dengan leasing secara tidak adil. Bahkan tidak sedikit di antara korban yang diteror, dianiaya, sampai pada taraf dikeroyok dan diambil paksa motornya. Selain itu, alasan memerangi sistem riba (baca; leasing) juga sering menjadi faktor penggerak jalannya praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta.
3. Praktik jual beli kredit macet yang terjadi di Surakarta sebenarnya adalah jual beli yang dilakukan terhadap barang hak milik orang lain. Motor yang menjadi obyek transaksi belum berpindah hak kemilikannya. Secara hukum, motor tersebut masih di bawah kepemilikan leasing. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih ditahan oleh pihak leasing dan belum ada pengembalian nama hingga angsuran kredit yang telah disepakati selesai. Sebagaimana definisi dan fungsi leasing itu sendiri, barang yang dijadikan obyek transaksi sebenarnya berlaku hukum peminjaman yang kemudian didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Sehingga jual beli motor yang dilakukan oleh debitur dengan pihak lain sebelum selesai masa angsuran kreditnya, sejatinya adalah jual beli terhadap barang hak kepemilikan orang lain. Dalam hukum Islam, jual beli semacam ini disebut dengan jual beli *fudhuli*, yaitu orang yang melakukan jual beli barang milik orang

lain yang ada padanya tanpa wewenang atau izin dari pemilik barang. Dalam pandangan Mazhab Hanafiah dan Malikiyah, jual beli seperti ini dianggap sah tapi tertangguhkan sampai mendapatkan ridha atau persetujuan dari pemilik barang. Bila pemilik barang tidak setuju dengan transaksi tersebut maka jual beli dianggap batal. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i dan Hanbali jual beli *fudhuli* dianggap sama sekali tidak sah dan proses transaksinya tidak boleh dilanjutkan. Karena sejak awal ia sudah cacat hukum, yaitu tidak mendapatkan izin secara syar'i ketika melakukan akad.

4. Praktik jual beli motor kredit macet yang terjadi di Surakarta juga menyalahi beberapa norma hukum yang berlaku dalam tatanan hukum ekonomi syariah. Di antaranya, dalam praktik jual beli tersebut ada unsur kesengajaan dari pihak debitur untuk melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam hal ini ada dua tipe debitur; *pertama*; debitur yang sejak awal sudah punya '*itikad* tidak baik untuk memutuskan kesepakatan (perjanjian). *Kedua*; debitur yang meremehkan hutang hingga tidak mau melanjutkan pembayaran angsuran. Kedua tipe debitur di atas jelas bertentangan dengan norma hukum yang disepakati oleh semua ulama mazhab dan bisa terjerumus dan dosa besar. Demikian juga argumentasi sebagian pelaku yang ingin memerangi sistem ribawi. Alasan tersebut berlawanan dengan hukum islam. Sebab, sistem ribawi yang dimaksud tidak bisa dikategorikan kondisi darurat yang memberikan alternatif untuk melakukan perbuatan haram. Walaupun tetap dipaksa bahwa sistem ribawi yang ada termasuk bahaya atau darurat yang harus dihilangkan maka dalam kaidah hukum disebutkan bahwa upaya menghilangkan sistem tersebut tidak boleh terjerumus dalam bahaya atau mudarat yang serupa lainnya atau bahkan bahaya yang lebih besar. Sementara penggelapan barang atau perampasan hak milik orang lain jelas lebih besar bahayanya daripada anggapan bahaya sistem riba.

4.2 Saran

1. Praktik jual beli motor kredit macet seringkali terjadi berawal dari pihak debitur yang menunda-nunda angsuran kredit hingga kesulitan melunasinya, maka kepada pihak debitur disarankan agar tidak lari dari tanggung jawab atau menjual motor jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain. Ada prosedur yang bisa dilalui tanpa harus melanggar hukum. Sebab, menjual motor yang belum berpindah kepemilikan secara sempurna adalah tidak sah transaksinya dalam pandangan seluruh ulama mazhab.
2. Kepada pihak kreditur terutama perusahaan leasing agar tetap memberi keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi angsurannya dan tidak menyita unit motor secara langsung tanpa jalur hukum. Sebab, pelaksanaan eksekusi atas objek fidusia harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan.
3. Kepada tokoh agama di kota Surakarta, khususnya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Surakarta, untuk mengeluarkan fatwanya tentang persoalan jual beli motor kredit macet dan mensosialisakannya kepada masyarakat.
4. Kepada Pemerintah Kota Surakarta kiranya dapat membuatkan sebuah peraturan khusus yang lebih tegas untuk menindak pihak *debt collector* yang menyita secara paksa unit motor dari debitur tanpa melalui keputusan pengadilan serta para pelaku yang terlibat dalam jual beli kredit macet di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alu Burnu, Muhammad Shidqi. 2003. *al-Mausu'ah al- Qawa'id al-Fiqhiyah*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah.
- An-Nawawi, Abu Dzakariya Muhyiddin. 2005. *Minhajut at-Thalibin wa Umdatul al-Muftin fi al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Hanbali Syamsuddin As-Safaraini. 2007. *Kasyfu al-Lisam Syarh Umdati al-Ahkam*. Suriah: Dar an-Nawadir.
- Al-Haytami, Syihabuddin Ibnu Hajar. 1987. *Az-Zawajir 'An Iqtiraf Al-Kabair*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islam wa adillatuhu*. 2005. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Al-Hanbali, Mar'iy bin Yusuf al-Maqdishi. 2004. *Dalilu at-Thalib li Naili al-Mathalib*. Riyadh: Dar Taibah.
- As-Subki, Tajuddin. 1991. *al-Asybah wa an-Nadhair*. Riyadh: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Fitria, Nurul. 2012. "Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan To Deposit Ratio Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang. (periode 2007-2011)". Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol.1. No.1.
- Najim, Ibnu. Zainuddin bin Ibrahim. 1999. *al-Asybah wa an-Nadhair 'ala Madzhab Abi Hanifah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Shobron. Sudarno. dkk. 2016. Pedoman Penulisan Tesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah. 1404. *Al-Mausu'ah Al-Quwaitiyah Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dar al-Salasil.